

REALISASI

PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2012

(Data per Desember 2012)

Berdasarkan Keputusan DPR-RI No. 08/DPR RI/II/2011-2012 dan No. 10A/DPR RI/I/2012-2013 terdapat 69 (enam puluh sembilan) RUU yang menjadi prioritas Prolegnas Tahun 2012.

- Keputusan DPR RI tanggal 16 Desember 2011 No. 08/DPR RI/II/2011-2012 tentang Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2012 menetapkan 64 (enam puluh empat) RUU sebagai prioritas Prolegnas Tahun 2012 dan RUU Daftar Kumulatif Terbuka, dengan perincian 42 (empat puluh dua) RUU Prakarsa DPR dan 22 (dua puluh dua) RUU Prakarsa Pemerintah
- Keputusan DPR-RI No. 10A/DPR RI/I/2012-2013 Tentang Penetapan 5 (Lima) RUU Tambahan Dalam Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2012 telah menetapkan 5 (lima) RUU sebagai tambahan prioritas Prolegnas Tahun 2012, dengan perincian 4 (empat) RUU Prakarsa DPR dan 1 (satu) RUU Prakarsa Pemerintah.

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA	REALISASI	KETERANGAN (UNTUK YANG BELUM TEREALISASI)
1	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	DPR	Telah disahkan menjadi UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
2	RUU tentang Penanganan Konflik Sosial	DPR	Telah disahkan menjadi UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA	REALISIASI	KETERANGAN (UNTUK YANG BELUM TEREALISASI)
3	RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan	DPR		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Pansus (Judul RUU berubah menjadi RUU tentang Organisasi Masyarakat)
4	RUU tentang Aparatur Sipil Negara	DPR		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi II
5	RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar	DPR		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi IV (Judul RUU berubah menjadi RUU tentang Pemberantasan Perusakan Hutan)
6	RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	DPR		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi IV
7	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan	DPR	Telah disahkan menjadi UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan	
8	RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro	DPR	Telah disetujui pada Rapat Paripurna DPR tanggal 11-12-2012, menunggu pengesahan Presiden	
9	RUU tentang Tata Kelola Pendidikan Tinggi	DPR	Telah disahkan menjadi UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	
10	RUU tentang Pendidikan Kedokteran	DPR		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi X
11	RUU tentang Komponen Cadangan	PEMERINTAH		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi I
12	RUU tentang Keamanan Nasional	PEMERINTAH		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi I
13	RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	PEMERINTAH	Telah disahkan menjadi UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	
14	RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	PEMERINTAH	Telah disahkan menjadi UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA	REALISIASI	KETERANGAN (UNTUK YANG BELUM TEREALISASI)
			Peradilan Pidana Anak	
15	RUU tentang Koperasi	PEMERINTAH	Telah disahkan menjadi UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian	
16	RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah	PEMERINTAH		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi XI
17	RUU tentang Industri Pertahanan dan Keamanan	DPR	Telah disahkan menjadi UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan	
18	RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	DPR		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Pansus
19	RUU tentang Jaminan Produk Halal	DPR		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi VIII
20	RUU tentang Jalan	DPR		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi V
21	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR		Internal Pemrakarsa (Komisi I DPR)
22	RUU tentang Pertanahan	DPR		Internal Pemrakarsa (Komisi II DPR)
23	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi	DPR		Tidak dilanjutkan penyusunannya oleh Komisi III
24	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	DPR		Internal Pemrakarsa (Komisi IV DPR)
25	RUU tentang Jasa Konstruksi	DPR		Internal Pemrakarsa (Komisi V DPR)
26	RUU tentang Pencarian dan Pertolongan	DPR		Internal Pemrakarsa (Komisi V DPR)
27	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	DPR		Internal Pemrakarsa (Komisi VI DPR)

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA	REALISIASI	KETERANGAN (UNTUK YANG BELUM TEREALISASI)
28	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	DPR		Internal Pemrakarsa (Komisi VII DPR)
29	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji	DPR		Internal Pemrakarsa (Komisi VIII DPR)
30	RUU tentang Kesetaraan Gender	DPR		Internal Pemrakarsa (Komisi VIII DPR)
31	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	DPR		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Pansus (Judul RUU berubah menjadi RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri)
32	RUU tentang Keperawatan	DPR		Internal Pemrakarsa (Komisi IX DPR)
33	RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR		Internal Pemrakarsa (Komisi IX DPR)
34	RUU tentang Kawasan Pariwisata Khusus	DPR		Internal Pemrakarsa (Komisi X DPR)
35	RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	DPR		Internal Pemrakarsa (Komisi XI DPR)
36	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia	DPR		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Pansus (Judul RUU berubah menjadi RUU tentang Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga)

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA	REALISIASI	KETERANGAN (UNTUK YANG BELUM TEREALISASI)
37	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	DPR		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Pansus
38	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	DPR		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi III
39	RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	DPR		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi III
40	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	DPR		Internal Pemrakarsa (Badan Legislasi DPR)
41	RUU tentang Perlakuan Khusus Provinsi Kepulauan	DPR		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Pansus (Judul RUU berubah menjadi RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan)
42	RUU tentang Pembiayaan Perumahan Rakyat	DPR		Internal Pemrakarsa (Badan Legislasi DPR)
43	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	DPR		Internal Pemrakarsa (Badan Legislasi DPR)
44	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	DPR		Internal Pemrakarsa (Badan Legislasi DPR)
45	RUU tentang Lambang Palang Merah	DPR		Internal Pemrakarsa (Badan Legislasi DPR)
46	RUU tentang Keinsinyuran	DPR		Internal Pemrakarsa (Badan Legislasi DPR)
47	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	DPR		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Pansus

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA	REALISIASI	KETERANGAN (UNTUK YANG BELUM TEREALISASI)
48	RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat	DPR		Internal Pemrakarsa (Badan Legislasi DPR)
49	RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji	PEMERINTAH		Internal Pemrakarsa (Permintaan paraf kepada Menteri terkait sebelum penerbitan Surat Presiden untuk penyampaian ke DPR)
50	RUU tentang Desa	PEMERINTAH		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Pansus
51	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	PEMERINTAH		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Pansus
52	RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah	PEMERINTAH		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi II
53	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	PEMERINTAH		Sudah disampaikan oleh Presiden kepada DPR tanggal 11-12-2012
54	RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	PEMERINTAH		Internal Pemrakarsa (Penyempurnaan RUU oleh Kementerian Hukum dan HAM)
55	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	PEMERINTAH		Sudah disampaikan oleh Presiden kepada DPR tanggal 11-12-2012
56	RUU tentang Tenaga Kesehatan	PEMERINTAH		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi IX
57	RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan	PEMERINTAH		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi XI
58	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian	PEMERINTAH		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi XI
59	RUU tentang Administrasi Pemerintahan	PEMERINTAH		Internal Pemrakarsa (Permintaan paraf kepada Menteri terkait sebelum penerbitan Surat Presiden untuk penyampaian ke DPR)

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA	REALISIASI	KETERANGAN (UNTUK YANG BELUM TEREALISASI)
60	RUU tentang Perdagangan	PEMERINTAH		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi VI
61	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian	PEMERINTAH		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi VI
62	RUU tentang Veteran	PEMERINTAH	Telah disahkan menjadi UU No. 15 Tahun 2012 Veteran Republik Indonesia	
63	RUU tentang Rahasia Negara	PEMERINTAH		Internal Pemrakarsa (Permintaan paraf kepada Menteri terkait sebelum penerbitan Surat Presiden untuk penyampaian ke DPR)
64	RUU tentang Keantariksaan	PEMERINTAH		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi VII
65	RUU tentang Kesehatan Jiwa	DPR		Internal Pemrakarsa (Komisi IX DPR)
66	RUU tentang Sistem Perbukuan Nasional	DPR		Internal Pemrakarsa (Komisi X DPR)
67	RUU tentang Kebudayaan	DPR		Internal Pemrakarsa (Komisi X DPR)
68	RUU tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat	DPR		Internal Pemrakarsa (Komisi III DPR)
69	RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme	PEMERINTAH		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Pansus

Catatan: Point No. 65 s.d 69 adalah RUU prioritas tambahan Prolegnas Tahun 2012 berdasarkan Keputusan DPR-RI No. 10A/DPR RI/I/2012-2013

DAFTAR KUMULATIF TERBUKA

1.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 3 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hong Kong Republik Rakyat China Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (<i>Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Hong Kong Special Administrative Region Of The People's Republic Of China Concerning Mutual Legal Assistance In Criminal Matters</i>); 2. UU No. 5 Tahun 2012 tentang Pengesahan <i>Asean Convention on Counter Terrorism</i> (Konvensi Asean Mengenai Pemberantasan Terorisme) 3. UU No. 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan <i>International Convention on The Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families</i> (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya) 4. UU No. 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan <i>Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography</i> (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak) 5. UU No. 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan <i>Optional Protocol to the Convention of Children in Armed Conflict</i> (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata).
2.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 2. UU No. 14 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 3. UU No. 19 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013
3.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara 2. UU tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Disetujui pada Rapat Paripurna DPR tanggal 25-10-2012) 3. UU tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Disetujui pada Rapat Paripurna DPR tanggal 25-10-2012) 4. UU tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi di Papua Barat (Disetujui pada Rapat Paripurna DPR tanggal 25-10-2012) 5. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat (Disetujui pada Rapat Paripurna

		<p>DPR tanggal 25-10-2012)</p> <p>6. UU tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Disetujui pada Rapat Paripurna DPR tanggal 14-12-2012)</p> <p>7. UU tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Disetujui pada Rapat Paripurna DPR tanggal 14-12-2012)</p> <p>8. UU tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Disetujui pada Rapat Paripurna DPR tanggal 14-12-2012)</p> <p>9. UU tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Disetujui pada Rapat Paripurna DPR tanggal 14-12-2012)</p> <p>10. UU tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara (Disetujui pada Rapat Paripurna DPR tanggal 14-12-2012)</p> <p>11. UU tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Pematang Ilir di Sumatera Selatan (Disetujui pada Rapat Paripurna DPR tanggal 14-12-2012)</p> <p>12. UU tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Disetujui pada Rapat Paripurna DPR tanggal 14-12-2012)</p>
4.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang	
5.	RUU Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi	